

ANALISIS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2010-2014

Ginanjari Anas Permadi¹
Sri Rahayu Budi Hastuti²

***Abstract: Financial Governmental Analysis of Banjarnegara District, Central Java Province Year 2010-2014.** This study aims to analyze the financial of region government of Banjarnegara district years 2010-2014. The data used in this research is data of budget income and expenditure of region (APBD) of Banjarnegara district. Analytical tool used in this study is : 1. ratio of financial self reliance, 2. ratio of financial dependence 3. degree of fiscal decentralization, 4. Effectiveness and efficiency of Revenue Original Regional (PAD), 5. Effectiveness and efficiency of regional tax. The results showed that the Government of Banjarnegara district years 2010-2014 is : 1. financial self reliance included low once and the pattern of relationship with the central and province is instructive with average value of financial independence 8.99 percent, 2. the financial dependence toward Central and Province is include the very high with average value of financial dependency is 91.77 percent, 3. the degree of fiscal decentralization include very less, with average value of degree of fiscal decentralizations is 8.22 percent, 4. effectiveness and efficiency of PAD include very effective and very efficient, with average value of effectiveness of PAD is 114.82 percent and average value of efficiency of PAD is 3.00 percent, 5. The effectiveness and efficiency of regional tax include very effective and very efficient, with the average value of effectiveness of regional tax is 114.70 percent and average value of efficiency of regional tax is 4.36 percent. Base on average value of change fifth ratio analysis per year, indicating that the financial performance of the Banjarnegara district are all the more better.*

Abstrak: Analisis Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2010-2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjarnegara. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. rasio kemandirian keuangan, 2. rasio ketergantungan keuangan 3. tingkat desentralisasi fiskal, 4. Efektivitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), 5. efektivitas dan efisiensi pajak daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2010-2014 adalah: 1. kemandirian keuangan termasuk rendah sekali dan pola hubungan daerah dengan pusat dan Provinsi instruktif dengan rata-rata nilai kemandirian keuangan 8,99 persen, 2. ketergantungan keuangan terhadap pusat dan Provinsi termasuk sangat tinggi dengan rata-rata nilai ketergantungan keuangan adalah 91.77 persen, 3. tingkat desentralisasi fiskal termasuk sangat kurang dengan nilai rata-rata tingkat desentralisasi fiskal adalah 8.22 persen, 4. efektivitas dan efisiensi PAD termasuk sangat efektif dan sangat efisien, dengan

¹ Alumni Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

² Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, email: rahayubudih@yahoo.com

nilai rata-rata efektivitas PAD 114.82 persen dan nilai rata-rata efisiensi PAD 3,00 persen, 5. Efektifitas dan efisiensi pajak daerah termasuk sangat efektif dan sangat efisien, dengan nilai rata-rata efektivitas pajak daerah 114.70 persen dan nilai rata-rata efisiensi pajak daerah 4.36 persen. Berdasarkan nilai rata-rata perubahan kelima analisa rasio per tahun, menunjukkan bahwa kinerja keuangan dari Kabupaten Banjarnegara semua lebih baik.

Kata Kunci: Kemandirian Keuangan, Ketergantungan Keuangan, Derajat Desentralisasi Fiskal, Efektifitas dan efisiensi

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi di Indonesia yang terjadi di pertengahan tahun 1997 menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama bagi masyarakat. Puncak dari krisis tersebut adalah runtuhnya pemerintahan Orde Baru yang sentralistik dan menjadi awal reformasi. Reformasi dalam aspek pemerintahan antara lain berupa otonomi daerah yang dimulai dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan di revisi menjadi Undang-undang tahun 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang nomor 25 tahun 1999 dan di revisi menjadi undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dengan Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut telah dijadikan sebagai aturan umum dalam implementasi kebijakan otonomi daerah di seluruh Indonesia.

Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, pada hakekatnya bertujuan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan (Handayani, 2009). Selain itu Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan kewenangan pembagian tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Tujuan otonomi daerah pada dasarnya diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan potensi daerah secara nyata, optimal, terpadu dan dinamis, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan terhadap daerah dan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal atau daerah (Bastian, 2001).

Menurut (Halim, 2002), ciri-ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah : 1. Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. 2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kinerja keuangan daerah yang lebih baik agar tidak lagi tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui dana perimbangan. Namun tidak berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. Dana perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan maka daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas melakukan investasi pembangunan jangka panjang, dan sebagainya.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pasal 1 ayat 5 PP No. 58 Tahun 2005). Keuangan Daerah dapat juga diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga dengan segala satuan, baik yang berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku (Mamesa, 1995).

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Halim dan Damayanti, 2007). Pengelolaan keuangan daerah menganut prinsip transparansi, akuntabilitas, dan value for money. Transparansi merupakan wujud adanya keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Prinsip akuntabilitas terkait dengan pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran, mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat (Yuwono, 2008). Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, agar terwujud tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, diperlukan suatu proses pengawasan dan pengendalian pengelolaan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan utamanya terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah (Yuwono, 2008).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banjarnegara dilihat dalam APBD tergolong kecil dibandingkan dana perimbangan dari pusat maupun Provinsi (lihat table 1).

Tabel 1:

Realisasi APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010-2014 (Rupiah)

Struktur APBD	2010	2011	2012	2013	2014
Total					
Pendapatan Daerah	849.221.591.000	1.078.602.748.021	1.193.098.804.187	1.279.702.465.966	1.403.398.262.639
Pendapatan Asli Daerah	62.486.768.063	71.1806.953.223	94.271.467.989	98.975.318.350	161.652.537.773
Dana Perimbangan	615.050.728.641	672.410.850.729	794.742.431.657	879.697.277.639	915.782.706.561
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	172.175.082.977	335.084.944.069	304.084.904.541	301.029.869.977	325.963.018.305
Belanja	864.062.435.992	1.037.963.356.757	1.111.145.362.420	1.175.474.028.855	1.349.769.030.982
Belanja Tidak Langsung	589.664.206.537	675.872.971.098	737.973.515.382	781.887.100.388	854.474.012.682
Belanja Langsung	274.398.229.455	362.090.385.659	373.171.847.038	393.586.928.467	495.295.018.300
Surplus/ (Defisit)	(14.349.856.311)	40.639.391.264	81.953.441.767	104.228.437.111	53.629.231.657

Sumber : DPPKAD Kabupaten Banjarnegara (2016)

Dari tabel 1, terlihat bahwa kabupaten Banjarnegara selama tahun 2010-2014 nilai PAD selalu lebih rendah dari dana perimbangan. Untuk itu maka perlu dilakukan pengkajian secara mendalam mengenai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam menjalankan otonomi daerah. Analisis terhadap APBD sebagai tolak ukur kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara sebagai bagian dari kinerja menjalankan kewenangan otonomi di segala aspek. Salah satu teknik analisis yang paling banyak digunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah Analisis Rasio Keuangan. Analisis Rasio Keuangan dapat dilakukan dengan cara mengitung rasio

kemandirian daerah, rasio ketergantungan daerah, derajat desentralisasi, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi PAD, rasio efektivitas pajak daerah, rasio efisiensi pajak daerah, derajat kontribusi BUMD, rasio kemampuan mengembalikan pinjaman, rasio pendapatan terhadap hutang (Mahmudi, 2010).

Penelitian tentang rasio keuangan sudah banyak dilakukan antara lain adalah : Rahman, Naukoko, Albert (2014) melakukan penelitian mengkaji tentang “Analisis Perbandingan Kemampuan Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara (Studi Pada kota Manado Dan Kota Bitung Tahun 2008-2012) dengan menggunakan analisis rasio kemandirian, rasio ddf, rasio ikr, rasio pertumbuhan, rasio keserasian. Hasil berbagai analisis rasio, disimpulkan bahwa kemampuan kota Manado dan kota Bitung masih tergolong kurang mampu dalam pembiayaan pengeluaran rutin yang dilakukan, terlihat juga bahwa pemerintah di kedua Kota tersebut masih mengandalkan pendapatan dari dana transfer pemerintah pusat.

Agustina (2013) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat kemandirian Daerah Di Era otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011)” dengan menggunakan analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. Dari hasil analisis rasio keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah kota Malang terus membaik.

Fambayun (2013) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Kabupaten Magetan (Tahun Anggaran 2009-2013)” dengan menggunakan alat analisis Rasio Kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kinerja pengelolaan keuangan dan tingkat kemandirian daerah kabupaten Magetan berdasarkan analisis rasio keuangan adalah baik, yang dapat dilihat dari rasio kemandirian rata-rata 6,84 persen, rasio efektivitas rata-rata 120,62 persen, rasio efisiensi 2,40 persen, rasio aktivitas menunjukkan pemerintah lebih memprioritaskan belanja rutin dibanding belanja tidak rutin dan pemerintah Kabupaten Magetan kinerjanya makin baik.

Hidayat, Pratomo, dan Agus (2012) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran Di Sumatera Utara”. Penelitian ini menggunakan analisis pertumbuhan, analisis peranan, analisis peta kemampuan keuangan dengan metode kuadran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kabupaten Pemekaran : 1. pertumbuhan penerimaan lebih besar daripada pengeluarannya. 2. pertumbuhan PAD positif tetapi peranannya relatif kecil dalam struktur APBD. 3. peta kemampuan keuangan dengan metode kuadran mengindikasikan ketidaksiapan masing-masing kabupaten dan masih kurangnya kemandirian dalam menjalankan otonomi daerah.

Efendi dan Wuryanti (2011) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otda Di Kabupaten Nganjuk” menggunakan alat analisis rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio indeks kemampuan rutin, rasio keserasian, rasio pertumbuhan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Rasio kemandirian rendah sekali, 2. Rasio derajat desentralisasi fiskal masih kurang, 3. Rasio indeks kemampuan rutin berskala kurang, 4. Rasio keserasian menunjukkan hasil belanja rutin lebih besar dari belanja pembangunan, 5. Rasio pertumbuhan terjadi pertumbuhan positif dan negatif.

Berdasarkan kondisi APBD kabupaten Banjarnegara dan hasil penelitian diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: 1. Bagaimana kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam membiayai pembangunan dinilai dari rasio kemandirian daerah? 2. Bagaimana tingkat ketergantungan pemerintah Kabupaten Banjarnegara terhadap pemerintah pusat dan provinsi ditinjau dari rasio ketergantungan? 3. Bagaimana kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara dalam penyelenggaraan desentralisasi fiskal ditinjau dari rasio derajat desentralisasi fiskal? 4. Bagaimana efektifitas

dan efisiensi PAD Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam merealisasikan PADnya? 5. Bagaimana efektifitas dan efisiensi pajak daerah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam merealisasikan pendapatan pajak daerahnya?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian diskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang berusaha memecahkan masalah yang ada berdasarkan dengan menyajikan data dan menganalisis serta menginterpretasikannya (Surakhmad, 2005). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berdasarkan runtun waktu periode 2010-2014 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (2016), Bappeda, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) 2016, buku-buku literature dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

Untuk menganalisis permasalahan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara digunakan alat analisis rasio keuangan yang terdiri atas: 1. **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**. Rasio menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dihitung dengan rumus (Halim, 2004) :

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat+Provinsi}} \times 100\%$$

Tabel 2 :

Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah dan Pola Hubungan		
Rasio Kemandirian (%)	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
0 – 25	Rendah sekali	Instruktif
25 – 50	Rendah	Konsultatif
50 – 75	Sedang	Partisipatif
75 – 100	Tinggi	Delegatif

Sumber : Halim, (2004)

Rasio kemandirian keuangan, sekaligus menunjukkan Pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pola hubungan tersebut meliputi: 1. *instruktif*, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. 2. *konsultatif*, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi. 3. *partisipatif*, yaitu pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. 4. *delegatif*, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

2. **Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**. Rasio ini merupakan ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, dihitung dengan rumus (Mahmudi, 2010):

$$\text{Rasio ketergantungan keuangan daerah} : \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3:

Kriteria Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan (%)	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat rendah
10,01-20,00	Rendah
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Tinggi
>50,00	Sangat tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri - Fisipol UGM, (1991).

3. Derajat Desentralisasi Fiskal. Alat ini menunjukkan derajat kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan Mahmudi, (2010) :

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} : \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4:

Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal

Nilai Derajat Desentralisasi Fiskal (%)	Derajat Desentralisasi
0,00 - 10,00	Sangat kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, (1991)

4. Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4.1. Efektifitas PAD. Efektifitas ini merupakan rasio antara realisasi PAD dengan target PAD yang ditargetkan/dianggarkan. Menurut Bhinadi (2003), rasio ini disebut juga sebagai Tingkat Pencapaian Target PAD.

$$\text{Efektifitas PAD} : \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 5:

Kriteria Efektifitas PAD

Nilai efektifitas (%)	Tingkat efektifitas PAD
< 75	Tidak efektif
75 – 89	Kurang efektif
90 – 99	Cukup efektif
100	Efektif
>100	Sangat efektif

Sumber : Mahmudi, (2010)

4.2. Efisiensi PAD. Efisiensi PAD mengukur kinerja keuangan daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD. Indikator efektifitas PAD saja tidak cukup karena dimungkinkan

efektivitasnya tinggi tetapi tidak efisien, sehingga kurang baik. Untuk itu perlu menghitung rasio efisiensi PAD dengan rumus (Mahmudi, 2010):

$$\text{Efisiensi PAD} : \frac{\text{Biaya Pemungutan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 6:
Kriteria Efisiensi PAD

Nilai efisiensi (%)	Tingkat Efisiensi PAD
> 40	Tidak efisien
31 – 40	Kurang efisien
21 – 30	Cukup efisien
10 – 20	Efisien
< 10	Sangat efisien

Sumber : Mahmudi, (2010)

5. Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah

5.1. Efektifitas pajak daerah. Efektifitas ini menunjukkan kinerja keuangan dalam memungut pajak sesuai jumlah pajak daerah yang ditargetkan.

$$\text{Efektifitas Pajak Daerah} : \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

5.2. Efisiensi pajak daerah. Efisiensi pajak daerah juga digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak dikatakan efisien apabila nilai yang dicapai kurang dari 10%, dan nilai efisiensi makin kecil maka makin baik (Mahmudi, 2010)

$$\text{Efisiensi Pajak Daerah} : \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria efektivitas Pajak Daerah dan efisiensi pajak daerah sama dengan kriteria efektifitas PAD dan efisiensi PAD (lihat tabel 5 dan 6).

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 7:
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2010–2014

Tahun	Rasio Kemandirian(%)	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
2010	7.93	Rendah Sekali	Instruktif
2011	7.05	Rendah Sekali	Instruktif
2012	8.57	Rendah Sekali	Instruktif
2013	8.38	Rendah Sekali	Instruktif
2014	13.01	Rendah Sekali	Instruktif
Rata - Rata	8.99	Rendah Sekali	Instruktif

Sumber : hasil olah data

Berdasarkan rasio kemandirian Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2010–2014 berfluktuatif. Hal ini bisa dilihat pada tahun 2010 yaitu sebesar 7.93 persen, kemudian tahun

2011 mengalami penurunan 0.88 persen menjadi 7.05 persen, tahun 2012 meningkat 1.55 persen menjadi 8.57 persen, tahun 2013 kembali menurun 0.19 persen menjadi 8.38 persen dan tahun 2014 meningkat lagi cukup signifikan 4.63 persen menjadi 13.01 persen. Selama tahun 2010-2014 rasio kemandirian Kabupaten Banjarnegara mempunyai rata-rata sebesar 8.99 persen termasuk rendah sekali dan mempunyai pola hubungan Instruktif yang berarti peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah itu sendiri atau masih sangat tergantung pada pihak eksternal (pemerintah pusat dan provinsi) dalam pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal ini bisa dikatakan bahwa kemandirian daerah Kabupaten Banjarnegara dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2010-2014 masih rendah dan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi-potensi daerahnya untuk membiayai pemerintahan dan pembangunannya masih rendah sekali. Dengan kata lain Kabupaten Banjarnegara belum siap untuk menjalankan Otonomi Daerah secara menyeluruh.

Namun dilihat dari perubahan nilai rata-rata rasio kemandirian yang mengalami peningkatan sebesar 1.27 persen per tahun, menunjukkan bahwa kemandirian keuangan Kabupaten Banjarnegara semakin membaik. Dengan demikian walaupun kemandirian keuangan daerahnya masih rendah sekali tetapi kemandirian keuangan daerahnya semakin membaik.

2. Ketergantungan Keuangan Daerah

Tabel 8:

Rasio Ketergantungan Keuangan Tahun 2010–2014

Tahun	Rasio Ketergantungan (%)	Ketergantungan Keuangan Daerah
2010	92.64	Sangat Tinggi
2011	93.40	Sangat Tinggi
2012	92.09	Sangat Tinggi
2013	92.26	Sangat Tinggi
2014	88.48	Sangat Tinggi
Rata – rata	91.77	Sangat Tinggi

Sumber : hasil olah data

Berdasarkan rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2010–2014 juga berfluktuatif. Hal ini bisa dilihat pada tahun 2010 rasio ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat 92.64 persen, kemudian tahun 2011 meningkat 0.76 persen menjadi 93.40, tahun 2012 mengalami penurunan 1.31 persen menjadi 92.09 persen, tahun 2013 kembali meningkat 0.17 persen menjadi 92.26 persen dan tahun 2014 mengalami penurunan yang cukup signifikan 3.78 persen menjadi 88.48 persen. Secara umum pada tahun 2010-2014 rata-rata rasio ketergantungan keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara sebesar 91.77 persen, yang berarti tingkat ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara masih sangat tinggi terhadap pemerintah pusat maupun provinsi. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan daerah yang bersumber PAD maupun sumber pendapatan daerah lainnya seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum optimal dalam membiayai aktifitas pembangunan daerahnya, sehingga masih sangat bergantung dengan transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi melalui dana perimbangan.

Dilihat dari perubahan nilai rasio ketergantungan yang rata-rata mengalami penurunan sebesar 1.04 persen per tahun, menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara terhadap pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi makin berkurang. Dengan demikian walaupun ketergantungannya masih sangat tinggi, tetapi kinerja

pemerintah semakin membaik karena ketergantungan keuangan daerah pada pemerintah pusat dan provinsi semakin berkurang.

3. Derajat Desentralisasi Fiskal

Tabel 9:
Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun 2010–2014

Tahun	Nilai Derajat Desentralisasi (%)	Derajat Desentralisasi Fiskal
2010	7.35	Sangat Kurang
2011	6.59	Sangat Kurang
2012	7.90	Sangat Kurang
2013	7.73	Sangat Kurang
2014	11.51	Kurang
Rata – rata	8.22	Sangat Kurang

Sumber : hasil olah data

Berdasarkan derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2010-2014 juga berfluktuatif. Hal ini bisa dilihat dari nilai derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Banjarnegara tahun 2010 sebesar 7.35 persen, kemudian tahun 2011 mengalami penurunan 0.76 persen menjadi 6.59 persen, tahun 2012 mengalami peningkatan 1.31 persen menjadi 7.90 persen, kemudian tahun 2013 kembali mengalami penurunan 0.17 persen menjadi 7.73, tahun 2014 mengalami peningkatan 3.78 persen menjadi 11.51 persen. Selama tahun 2010-2014 rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Banjarnegara memiliki rata-rata 8.22 persen yang mengindikasikan bahwa desentralisasi fiskal Kabupaten Banjarnegara termasuk sangat kurang. Hal ini juga menandai bahwa optimalisasi PAD dalam hal ini pemungutan pajak dan retribusi masih sangat kurang, karena PAD masih berperan sangat sedikit dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Banjarnegara. Pemerintah daerah masih sangat tergantung dari bantuan–bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat dan Provinsi berupa transfer melalui dana perimbangan.

Dilihat dari perubahan nilai Derajat Desentralisasi Fiskal yang rata-ratanya mengalami peningkatan sebesar 1.04 persen per tahun menunjukkan bahwa Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Banjarnegara semakin membaik. Dengan demikian walaupun derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Banjarnegara masih sangat kurang, tetapi derajat desentralisasi fiskal semakin membaik.

4. Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

4.1. Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel 10:
Efektifitas PAD Tahun 2010–2014

Tahun	Nilai efektifitas (%)	Tingkat efektifitas PAD
2010	101.20	Sangat Efektif
2011	112.72	Sangat Efektif
2012	121.30	Sangat Efektif
2013	111.76	Sangat Efektif
2014	127.11	Sangat Efektif
Rata – rata	114.82	Sangat Efektif

Sumber : hasil olah data

Berdasar tabel 10, Efektifitas PAD pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2010–2014 walaupun berfluktuatif namun tiap tahun selalu melebihi 100 persen. Hal ini bisa

dilihat pada tahun 2010 yang mencapai 101.20 persen, kemudian tahun 2011 mengalami peningkatan 11.52 persen menjadi 112.72 persen, tahun 2012 kembali mengalami peningkatan 8.58 persen menjadi 121.30 persen, tahun 2013 mengalami penurunan 9.54 persen menjadi 111.76 persen, tahun 2014 kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 15.35 menjadi 127.11 persen. Dengan tingkat Efektifitas PAD yang selalu diatas 100 persen dan nilai efektifitas rata-rata sebesar 114.82 persen, menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara dalam penerimaan PAD sangat efektif karena selalu melampaui target. Kondisi ini perlu terus dipertahankan dan di tingkatkan lagi untuk tahun-tahun ke depan.

Dilihat dari perubahan nilai Efektifitas PAD Kabupaten Banjarnegara memiliki rata-rata peningkatan sebesar 1.27 persen, menunjukkan bahwa kinerja keuangan dilihat dari efektifitas penerimaan PAD juga semakin membaik.

4.2. Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel 11:
Efisiensi PAD Tahun 2010–2014

Tahun	Nilai efisiensi (%)	Tingkat Efisiensi PAD
2010	4.02	Sangat Efisien
2011	3.58	Sangat Efisien
2012	1.84	Sangat Efisien
2013	1.91	Sangat Efisien
2014	1.84	Sangat Efisien
Rata – rata	3.00	Sangat Efisien

Sumber : hasil olah data

Berdasarkan tingkat efisiensi PAD pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2010–2014 juga mengalami fluktuasi. Dari tabel 11 bisa dilihat bahwa pada tahun 2010 efisiensi PAD 4.02 persen, kemudian tahun 2011 mengalami penurunan 0.44 persen menjadi 3.58, tahun 2012 kembali mengalami penurunan 1.74 persen menjadi 1.84 persen, tahun 2013 mengalami kenaikan 0.07 persen menjadi 1.91 persen dan pada tahun 2014 kembali mengalami penurunan 0.07 persen menjadi 1.84 persen. Walaupun berfluktuasi, namun nilai rata-rata efisiensi PAD Kabupaten Banjarnegara selama tahun 2010-2014 adalah 3.00 persen yang menunjukkan bahwa Kabupaten Banjarnegara sangat efisien dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah.

Dilihat dari perubahan nilai efisiensi PAD Kabupaten Banjarnegara memiliki rata-rata mengalami penurunan 0,55 persen, menunjukkan bahwa nilai tersebut makin kecil sehingga kinerja keuangan dilihat dari efisiensi penerimaan PAD juga semakin membaik.

5. Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah

5.1. Efektifitas Pajak Daerah

Tabel 12 :
Efektifitas Pajak Daerah Tahun 2010-2014

Tahun	Nilai efektifitas (%)	Tingkat efektifitas Pajak Daerah
2010	108.14	Sangat Efektif
2011	122.06	Sangat Efektif
2012	113.40	Sangat Efektif
2013	114.08	Sangat Efektif
2014	115.83	Sangat Efektif
Rata – rata	114.70	Sangat Efektif

Sumber : hasil olah data

Tingkat Efektifitas pajak daerah Kabupaten Banjarnegara selama tahun 2010–2014 juga berfluktuatif. Hal ini bisa dilihat pada tahun 2010 sebesar 108.14 persen, kemudian tahun 2011 mengalami kenaikan 13.92 persen menjadi 122.06 persen, kemudian tahun 2012 menurun 8.66 persen menjadi 113.40 persen, tahun 2013 kembali mengalami kenaikan 0.68 persen menjadi 114.08 persen, tahun 2014 kembali mengalami kenaikan 1.75 persen menjadi 115.83 persen. Efektifitas pajak daerah pemerintah Kabupaten Banjarnegara selama lima tahun juga selalu berada diatas 100 persen dan memiliki nilai rata-rata sebesar 114.70 persen. Dengan demikian maka kemampuan pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam mencapai target pajak selama lima tahun termasuk sangat efektif.

Dilihat dari perubahan nilai Efektifitas pajak daerah Kabupaten Banjarnegara memiliki rata-rata peningkatan sebesar 1.92 persen, menunjukkan bahwa kinerja keuangan dilihat dari efektifitas penerimaan pajak daerah juga semakin membaik.

5.2. Efisiensi Pajak Daerah

Tabel 13:
Efisiensi Pajak Daerah Tahun 2010–2014

Tahun	Nilai efisiensi (%)	Tingkat Efisiensi Pajak Daerah
2010	4.62	Sangat Efisien
2011	4.09	Sangat Efisien
2012	4.40	Sangat Efisien
2013	4.38	Sangat Efisien
2014	4.31	Sangat Efisien
Rata – rata	4.36	Sangat Efisien

Sumber : hasil olah data

Dari tabel 13, menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pajak daerah Kabupaten Banjarnegara selama lima tahun 2010–2014 juga berfluktuatif. Tingkat efisiensi pajak daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2010 sebesar 4.62 persen, kemudian tahun 2011 mengalami penurunan 0.53 persen menjadi 4.09 persen, tahun 2012 meningkat 0.31 persen menjadi 4.40 persen, tahun 2013 kembali menurun 0.02 persen menjadi 4.38 persen, dan tahun 2014 kembali menurun 0.07 persen menjadi 4.31 persen. Secara keseluruhan dalam kurun waktu lima tahun yaitu rata–rata nilai efisiensi pajak daerah Kabupaten Banjarnegara sebesar 4.36 persen dan kurang dari 10 persen sehingga termasuk sangat efisien.

Dilihat dari perubahan nilai efisiensi pajak daerah Kabupaten Banjarnegara memiliki rata-rata penurunan 0,08 persen, menunjukkan bahwa kinerja keuangan dilihat dari efisiensi penerimaan pajak daerah juga semakin membaik.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Dilihat dari nilai rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 8,99 persen per tahun, maka Kemandirian daerah Kabupaten Banjarnegara dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat masih rendah sekali. Dilihat dari perubahan rata-rata yang mengalami peningkatan sebesar 1.27 persen per tahun, maka kemandirian keuangan Kabupaten Banjarnegara semakin membaik. Dengan demikian walaupun kemandirian keuangan daerahnya masih rendah sekali tetapi kemandirian keuangan daerahnya semakin membaik.

2. Berdasar nilai rata-rata rasio ketergantungan keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara sebesar 91.77 persen, menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara terhadap pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi masih sangat tinggi. Pembiayaan pembangunan daerah masih sangat bergantung dengan

adanya transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi melalui dana perimbangan. Dilihat dari perubahan nilai rasio ketergantungan yang rata-ratanya mengalami penurunan sebesar 1.04 persen per tahun menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara terhadap pemerintah pusat maupun provinsi makin berkurang. Dengan demikian walaupun ketergantungannya masih sangat tinggi, tetapi ketergantungan makin berkurang dan kinerja pemerintah makin membaik.

3. Rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Banjarnegara memiliki rata-rata sebesar 8.22 persen, maka desentralisasi fiskal Kabupaten Banjarnegara termasuk sangat kurang. Namun dilihat dari perubahan nilai Derajat Desentralisasi Fiskal yang rata-ratanya mengalami peningkatan sebesar 1.04 persen per tahun menunjukkan bahwa Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Banjarnegara semakin membaik. Dengan demikian walaupun derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Banjarnegara masih sangat kurang, tetapi derajat desentralisasi fiskalnya makin membaik karena mengalami peningkatan.

4. Tingkat Efektifitas PAD yang selalu diatas 100 persen dan nilai efektifitas rata-rata sebesar 114.82 persen, maka kinerja pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara dalam penerimaan PAD sangat efektif karena selalu melampaui target. Dilihat dari perubahan nilai Efektifitas PAD yang memiliki rata-rata peningkatan sebesar 1.27 persen, menunjukkan bahwa kinerja keuangan dilihat dari efektifitas penerimaan PAD juga makin efektif atau makin membaik. Nilai efisiensi PAD per tahun rata-rata sebesar 3.00 persen, menunjukkan bahwa Kabupaten Banjarnegara sangat efisien dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah. Dan dilihat dari perubahan nilai efisiensi PAD Kabupaten Banjarnegara memiliki rata-rata penurunan 0,55 persen, menunjukkan bahwa nilai tersebut makin kecil atau makin efisien dan kinerja keuangan dilihat dari efisiensi penerimaan PAD juga semakin membaik.

5. Efektifitas pajak daerah pemerintah Kabupaten Banjarnegara selama lima tahun selalu berada diatas 100 persen dan memiliki nilai rata-rata sebesar 114.70 persen, sehingga kinerja keuangan dilihat dari efektifitas penerimaan pajak daerah juga sangat efektif. Dilihat dari perubahan nilai Efektifitas pajak daerah yang memiliki rata-rata peningkatan sebesar 1.92 persen, menunjukkan bahwa kinerja keuangan dilihat dari efektifitas penerimaan pajak daerah juga semakin membaik. Nilai efisiensi pajak daerah Kabupaten Banjarnegara rata-rata sebesar 4.36 persen dan kurang dari 10 persen juga termasuk sangat efisien. Perubahan nilai efisiensi pajak daerah Kabupaten Banjarnegara memiliki rata-rata penurunan 0,08 persen, menunjukkan bahwa kinerja keuangan dilihat dari efisiensi penerimaan pajak daerah juga makin efisien atau makin membaik.

Mengingat bahwa rendahnya tingkat kemandirian keuangan Pemerintah, tingginya tingkat ketergantungan keuangan pemerintah dan rendahnya derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten Banjarnegara, maka pemerintah daerah sebaiknya terus melakukan upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Adapun beberapa potensi yang seharusnya mampu dioptimalkan pengelolaannya oleh pemerintah daerah antara lain adalah pajak galian golongan c, potensi pariwisata seperti jumlah hotel, rumah makan, sentra-sentra bisnis dan lainnya. Jika Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berhasil mengoptimalkan pemanfaatan potensi tersebut, maka pajak dan retribusi yang merupakan penopang utama dalam meningkatkan PAD akan semakin meningkat, sehingga akan meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat dan Provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Oesi, (2013), *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-20011)*, Universitas Brawijaya Malang.
- Astriana, (2014), *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Magelang Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012*, Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Bastian, Indra, (2001), *Akuntansi Sektor Public*, Penerbit BPFE. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, (2016), *Statistik Keuangan Daerah Kabupaten/Kota*, <http://jateng.bps.go.id>.
- Bhinadi, Ardhito, (2003). *Mengukur Efektivitas, Efisiensi, dan Elastisitas Pajak Daerah*, disampaikan dalam Seminar Keuangan Daerah kerjasama Pusat Studi Ekonomi, Keuangan, dan Industri Lembaga Penelitian UPN “Veteran” Yogyakarta dengan Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi UPN “Veteran” Yogyakarta, Senin, 12 Mei 2003. <http://www.arditobhinadi.com/semua-download.html>
- Dinas Pendapatan, (2016), *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara, Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010–2014*.
- Efendi Dan Wuryanti, (2011), “*Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan OTDA Di Kabupaten Nganjuk*”. Semnas Ilmu Ekonomi Terapan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Fambayun, (2013), *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah kabupaten Magetan (Tahun Anggaran 2009-2013)*, Universitas Negeri Surabaya.
- Tim Litbang Fisipol UGM, (1991). *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Laporan Akhir Penelitian, Litbang Depdagri, Jakarta.
- Halim, Abdul, (2001). *Bunga rampai Keuangan Daerah*, Edisi Pertama, UUP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Halim, Abdul, (2004), *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul dan Damayanti, (2007), *Pengelolaan Keuangan Daerah, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

- Handayani, Atiah (2009), *Analisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat terhadap Pengeluaran Daerah dan Upaya Pajak (Tax Effort) Daerah Studi Kasus: Kabuapen/Kota di Jawa Tengah*, Skripsi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Uversitas Diponegoro, Semarang.
- Hidayat, Pratomo dan Agus, (2012),”*Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota pemekaran Di Sumatera Utara*”, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Kajian Ekonomi Negara Berkembang Vol 12 No 33, Hal 213-222, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Mahmudi, (2010), *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah-Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik*, Yogyakarta, Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Mamesa, (1995), *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*, Pt. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. <http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/60/906.bpkp>
- Rahman, Naukoko dan Albert. (2014),”*Analisis Perbandingan Kemampuan keuangan Daerah Di provinsi Sulawesi Utara (Study Pada Kota Manado Dan Kota Bitung Tahun 2008-2012)*”, Jurnal Berkala Ilmiah efisiensi Volume 4 No 3 Oktober 2014, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Republik Indonesia, Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah. <http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=339>
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.<http://www.djpk.depkeu.go.id/?tag=undang-undang>
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. <http://www.djpk.depkeu.go.id/?tag=undang-undang>
- Winarno, Surakhmad, (2005), *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar, Metode, Teknik)*, Tarsito, Bandung
- Yuwono, Utomo, Suheiry Zein, dan Azrafiany, (2008), *Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah)*, Bayumedia Publishing, Malang